

RESPON MASYARAKAT TERDAMPAK TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT ANGKASA PURA BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK PRAYA

Syarifuddin, Oryza Pneumatica I, Dwi Setiawan C.,
Anisa Pusparani, Ika Wijayanti, dan Solikatun

Dosen PS Sosiologi UNRAM

meow_solly@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembangunan diharapkan dapat berdampak secara riil terhadap ekonomi baik di sektor pariwisata, perhotelan, industri jasa, dan perdagangan bagi masyarakat disekitarnya. Keberadaan BIL memberikan dampak secara ekonomi maupun sosial kepada desa terdampak yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Ketara, Tanak Awu, dan Penunjak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis respon masyarakat terdampak terhadap program CSR-Comdev PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok (BIL). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada masyarakat terdampak, *stakeholder*, dan pihak PT Angkasa Pura. Masyarakat desa terdampak pada dasarnya adalah masyarakat mekanis yang memiliki solidaritas kuat. Keberadaan BIL tidak berdampak pada hubungan sosial dan budaya masyarakat terdampak. Namun, pembangunan BIL telah memberikan dampak munculnya sektor nonagraris seperti perdagangan dan jasa, pariwisata, dan industri kreatif. PT Angkasa Pura telah memberikan kontribusi bagi masyarakat terdampak melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan pemberian bantuan (CSR). Namun, jika dilihat secara ekonomi dan sosial, belum ada dampak yang massif terhadap perkembangan perekonomian. Hal ini disebabkan oleh program pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan tersebut belum terakses oleh masyarakat secara umum. Harapannya, pihak PT Angkasa Pura dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya dengan pemanfaatan potensi-potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Kata kunci : Respon, Masyarakat Terdampak, CSR, BIL

PENDAHULUAN

Keberadaan bandara dewasa ini menjadi sangat vital dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Tidak hanya sebagai prasarana transportasi yang efektif dan efisien, bandara menjadi salah satu penggerak roda perekonomian seiring dengan semakin pesatnya mobilitas masyarakat. Perkembangan pesat jasa pengguna transpor-

tasi udara dan desakan kebutuhan pemberian layanan yang maksimal menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya relokasi Bandara Selaparang yang sebelumnya berada di Kota Mataram menjadi Bandara Internasional Lombok yang berada di selatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Sejak resmi dibuka pada tanggal 1 Oktober 2011, Bandara Internasional

Lombok, atau sering disebut BIL terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari pembenahan infrastruktur, pelayanan dan pemenuhan kebutuhan transportasi udara. Selain itu, BIL sebagai pintu masuk dan pendorong roda perputaran ekonomi bagi masyarakat Lombok secara khusus, maupun Nusa Tenggara Barat secara umum, terus menunjukkan kontribusi khususnya dalam menunjang perekonomian, pendorong investasi, dan pengembangan pariwisata.

Tantangan terbesar keberadaan BIL adalah pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat sekitar lingkungan BIL. Lokasi BIL yang berada di tiga desa, yakni Desa Tanak Awu, Desa Penujak, dan Desa Ketara telah membawa dampak besar pada perubahan pola-pola ekonomi masyarakat. Warga masyarakat yang semula berprofesi sebagai petani, mulai bergeser menjadi pedagang. Perubahan orientasi mata pencaharian tersebut tidak terlepas dari relasi *mutual benefit* yang tercipta selama proses negosiasi lahan. Warga yang lahan pertaniannya dipergunakan sebagai lokasi BIL mendapatkan berbagai kompensasi baik berupa ganti rugi, dan kesempatan bekerja di BIL dan Angkasa Pura I, serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang salah satunya memfasilitasi warga masyarakat untuk berdagang di kawasan BIL.

Proses reorientasi pola ekonomi pada warga masyarakat di lingkaran bandara terus menunjukkan dinamika. Keberadaan BIL tidak hanya berdampak secara fisik akan tata ruang dan khas pemanfaatan lahan. Lokasi BIL yang dahulu merupakan lahan pertanian dengan corak masyarakat agraris bertransformasi ke sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. Hal ini terjadi seiring dengan perubahan pemanfaatan lahan.

Keberadaan BIL telah menstimulus hadirnya pusat pertumbuhan perekonomian baru. Keberadaan BIL yang telah dilengkapi dengan berbagai infrastruktur ekonomi telah mendorong munculnya kawasan perhotelan, pasar swalayan, sektor jasa dan pariwisata yang turut meningkatkan harga jual tanah. Meningkatnya nilai harga tanah secara langsung menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menjual tanah. Hal tersebut berdampak pada makna tanah yang tadinya dimanfaatkan untuk kepentingan umum menjadi orientasi nilai ekonomi secara pribadi (Hartanto 2012).

Kondisi sosial masyarakat di lingkaran BIL mengalami dinamika perubahan. Hasil kajian Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (P2LH) Universitas Mataram tahun 2014 menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja masih cukup dominan. Keberadaan BIL sebagai stimulus pusat pertumbuhan telah berdampak pada

roda ekonomi berupa pertokoan, perhotelan, pariwisata dan sektor lain. Kondisi tersebut diharapkan mampu menjadi penyerap tenaga kerja dalam mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Namun, kondisi sosial masyarakat prahadirnya BIL yang mayoritas berprofesi sebagai buruh tani belum sepenuhnya terakomodir. Hal ini disebabkan oleh kualifikasi warga masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani yang belum terserap sepenuhnya baik dalam kaitannya dengan keberadaan BIL maupun sektor informal lainnya. Berdasarkan kondisi sosial, potensi demografis, dan sumber daya alam di Desa Tanak Awu, dan Desa Ketara berada di Kecamatan Pujut juga Desa Penujak yang berada di Kecamatan Praya Barat, sebagai desa terdampak Pembangunan BIL (Bandara Internasional Lombok Praya) yang sangat potensial, sudah tentu akan dapat menjadi modal utama untuk peningkatan pembangunan desa dan lebih luas menjadi pilar Pembangunan Lombok Tengah di masa mendatang. Untuk keperluan itulah, maka perlu dikaji respon masyarakat terdampak terhadap program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam *Community Development (Comdev)* oleh Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Internasional Lombok Praya.

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat

terdampak terhadap program CSR-Comdev bagi PT Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandara Internasional Lombok Praya di Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanak Awu dan Desa Ketara yang berada di Kecamatan Pujut, serta Desa Penujak di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Tiga desa tersebut adalah desa yang merasakan dampak langsung atas Pembangunan Bandara Internasional Lombok Praya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti hendak menggambarkan secara lebih mendalam respon masyarakat terdampak terhadap program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Community Development (Comdev)* oleh PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Lombok Praya yang beroperasi di Kabupaten Lombok Tengah.

Informan penelitian ini yakni terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta pimpinan (manajer) PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Lombok Praya. Datadikumpulkan dengan beberapa cara wawancara mendalam dengan *guide interview* kepada para stakeholders, dan wawancara langsung dengan para pimpinan (manajer) PT Angkasa Pura I Kantor Cabang

Lombok Praya yang beroperasi di Kabupaten Lombok Tengah.

Data yang sudah terkumpul diolah dengan sistem tabulasi berdasarkan kategorisasi sesuai dengan indikator-indikator dalam tujuan penelitian. Data yang telah dikategorisasi akan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Data penelitian yang dianalisis merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder yang kemudian diklasifikasikan, yang selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan konsep teoritik yang dipergunakan.

HASIL PENELITIAN

3.1. Program CSR oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Lombok

Sebagai sebuah badan usaha atau perusahaan, PT Angkasa Pura I memiliki Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dimana pada organisasi pengelolaannya berada dibawah Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT AP I Nomor : KEP.146/OM.01.01/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.59/OM.01.01/2013 tanggal 19 Juni 2013.

Berdasarkan Keputusan Direksi tersebut, organisasi pengelola dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berubah dari unit PKBL menjadi unit *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan berada dibawah *President Director* di mana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada *President Director*. Pelaksanaan Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Kantor Pusat berada dibawah tanggung jawab *Head Of Corporate Social Responsibility* dan dilaksanakan langsung oleh *CSR Corporation Department Head* dan *Corporate Social Environment Department Head*.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terdiri dalam dua *grand program* yaitu Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi. Selain itu melalui Program Kemitraan, perusahaan juga memberikan bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran (promosi/pameran) dan lain-lain. Program tersebut dilaksanakan pada ruang lingkup lokal ini merupakan realisasi dari perencanaan program nasional yang tersentralisasi di Kantor Pusat (Jakarta).

1. Program Kemitraan

Program Kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dijalankan masyarakat, sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui program ini maka setiap UMK yang telah berkembang diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal, sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, masyarakat sekitar yang tidak bisa bekerja di lingkungan bandar udara tetap bisa merasakan manfaat dari kehadiran bandara-bandara yang dikelola perusahaan.

Program Kemitraan yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) diberikan dalam Bentuk Pinjaman Kemitraan dan Pembinaan Kemitraan. Pinjaman Kemitraan diberikan dalam jangka waktu tahunan yaitu, dari 1 (satu) tahun sampai dengan maksimal 3 (tiga) tahun dengan tingkat jasa administrasi pinjaman sebesar 6 (enam) persen flat per tahun.

Pembinaan Kemitraan diberikan dalam bentuk Hibah Pembinaan untuk kegiatan **pelatihan** yang akan meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam berbagai aspek. Kegiatan **promosi dan pameran** untuk memperkenalkan produk mitra binaan agar lebih dikenal khalayak umum, serta kegiatan **pemagangan** untuk memberikan

kesempatan kepada para mitra binaan saling bertukar informasi dan pengalaman dengan mitra binaan lainnya yang mempunyai usaha sejenis.

- Berdasarkan Laporan Aktivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2015 oleh PT Angkasa Pura I Kacab BIL, tercatat Pinjaman Kemitraan kepada Usaha Kecil yang diberikan PT Angkasa Pura I Kacab BIL diberikan sebesar Rp 2.500.000.000,- sifatnya non-komersial. Mekanisme penyalurannya dilakukan berdasarkan evaluasi atas persyaratan serta angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan usaha. Kegiatan penyaluran Pinjaman Kemitraan dengan pola semacam ini sudah dijalankan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tahun 1992, baik oleh kantor pusat dan kantor cabang di seluruh Indonesia.

Pembinaan terhadap mitra binaan dilakukan dalam bentuk hibah pendampingan (*knowledge capital*). Kegiatan pembinaan terhadap mitra binaan ini berupa program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, maupun lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan ilmu kewirausahaan dan motivasi berwirausaha. Dana yang dianggarkan untuk program ini di Tahun 2015 sebesar Rp 156.894.200. Kegiatan yang dilakukan

berupa pelatihan dan keterampilan perawatan kecantikan dan pengelolaan salon, pelatihan memasak, mengemas produk karya seni, dan sebagainya. Selain itu PT Angkasa Pura I (Persero) juga membantu promosi produk mitra binaan dengan membuka ruang pameran di bandara-bandara yang dikelola perusahaan. Ruang pameran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan promosi maupun pameran mitra binaan.

2. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan ini merupakan Komitmen Perusahaan dalam pemenuhan aspek sosial terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah keterlibatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terutama masyarakat di sekitar lokasi bandar udara berada. Hal tersebut diwujudkan Perusahaan dalam bentuk pelaksanaan Program Bina Lingkungan, yakni program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.

Pelaksanaan program bina lingkungan/objek yang dapat diberikan bantuan bina lingkungan meliputi:

- (1) Bantuan kepada korban bencana alam;
- (2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- (3) Bantuan peningkatan kesehatan masyarakat;

- (4) Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum;
- (5) Bantuan sarana ibadah;
- (6) Pelestarian alam.
- (7) Bantuan sosial pengentasan kemiskinan

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 yang dibuatkan di tahun sebelumnya ketujuh sasaran bantuan ini telah dianggarkan, namun pada revisi anggaran PT Angkasa Pura I (Persero) memprioritaskan bantuan pada tiga program, yaitu: bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan masyarakat dan bantuan sosial pengentasan kemiskinan. Dengan alokasi biaya masing-masing sebesar: (a) Rp 135.000.000,- untuk bantuan pendidikan, (b) Rp 345.133.725,- untuk bantuan peningkatan kesehatan masyarakat, dan (c) Rp 116.250.000,- untuk bantuan sosial pengentasan kemiskinan.

3. Bantuan Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat menjadi perhatian utama Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Program Bina Lingkungan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pendidikan merupakan salah satu pondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perhatian PT Angkasa Pura I (Persero) dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, diberikan dalam bentuk beasiswa kepada

siswa berprestasi yang kurang mampu. Selain itu juga ada bantuan fisik seperti bantuan pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan untuk kelancaran pendidikan dalam bentuk ketersediaan bahan bangunan berupa semen.

4. Bantuan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Bantuan bidang kesehatan diprioritaskan pada kegiatan yang bisa mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekitar lokasi bandara. Bantuan yang diberikan diwujudkan dalam bentuk pengobatan gratis, khitanan massal, bantuan sarana kesehatan, perbaikan bangunan fisik lembaga kesehatan, perbaikan sarana umum untuk kesehatan, dan sebagainya.

Salah satu kegiatan yang mendukung program ini adalah Kegiatan Pusling (Pelaksanaan Layanan Kesehatan Keliling) menjadi icon upaya PT Angkasa Pura I (Persero) Kacab BIL untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Pelaksanaan Layanan Kesehatan Keliling di Kecamatan Pujut meliputi pengobatan gratis kepada masyarakat umum, pemberian makanan tambahan (PMT) penyuluhan kepada balita dan ibu bayi, pemberian multivitamin kepada balita dengan umur 6 bulan sampai dengan 5 tahun, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat

umum. PT Angkasa Pura I (Persero) Kacab BIL juga menyediakan ambulance pelayanan keliling dengan kegiatan keliling yang terjadwal.

Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dan didukung oleh 3 (tiga) Puskesmas, yaitu Puskesmas Sengkol, Puskesmas Batunyalala dan Puskesmas Penujak.

5. Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan lainnya

Selain kegiatan dalam program yang telah disebutkan diatas. Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dapat dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya dan terdokumentasikan diantaranya adalah:

(1) Pelatihan Mekanik Roda Dua PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Lombok. Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 9 Januari 2012 – 14 Januari 2012 ini merupakan hasil kerjasama PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Lombok dengan PT Astra International Tbk - Honda Sales Operation (HSO) Cabang Mataram dan PPKP, menyelenggarakan Pelatihan Perbengkelan Mekanik Roda Dua, yang didanai dari dana Program Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero).

Pelatihan kali ini merupakan pelatihan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dengan meng-

ikutsertakan 24 (dua puluh empat) orang pemuda yang tidak berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program yang sama pada tahun 2011 (23-31 Mei 2012), pada kesempatan itu PT Angkasa Pura I (Pesero) mengikutsertakan 20 (dua puluh) orang pemuda di sekitar Bandar Udara Selaparang di Mataram.

(2) Kegiatan lainnya adalah Penanaman 30.000 pohon di Bendungan Batujai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Direktur Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) bersama-sama dengan Bupati Lombok Tengah, melaksanakan kegiatan penanaman 30.000 (tiga puluh ribu) pohon di sekitar Bendungan Batujai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Program penanaman pohon ini dibiayai oleh dana Program Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) dan merupakan salah satu bentuk kepedulian PT Angkasa Pura I (Persero) kepada masyarakat khususnya untuk mencegah pemanasan global sekaligus mendukung program pemerintah dalam menanam 1 Milyar pohon.

(3) Kegiatan Khitanan Massal dalam rangka Menyambut Hut Ke-50 PT. Angkasa Pura I (Persero) Kacab BIL. Melalui program

Bina Lingkungan telah melaksanakan kegiatan sosial berupa Khitanan Massal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tinggal disekitar Bandara Internasional Lombok sebagai wujud kepedulian kepada mereka yang membutuhkan, puluhan anak yang didampingi oleh orang tua mereka berdatangan untuk mengikuti kegiatan ini, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama dilaksanakan digedung AVSEC Bandara Bandara Internasional Lombok pada tanggal 30 januari 2014, Tahap kedua pelaksanaan khitanan massal dilaksanakan di dusun dasan Agung Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 01 Februari 2014.

(4) PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Lombok (BIL) Berbagi Sembako dengan ratusan warga Lingkungan Karang Baru Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah. Sebanyak 350 Paket sembako di serahkan kepada 350 kepala keluarga yang di serahkan langsung secara simbolis oleh General Manager Bapak Pujiono didampingi oleh Finance & IT Departement Head Bapak Djoko Wahyono, CSR Section Head Bapak Iwan Risdianto. Penyerahan paket sembako juga di hadiri oleh Camat Praya tengah, Lurah Sasake dan Kepala Lingkungan. Tujuan kegiatan ini adalah pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Lombok

berharap dapat meringankan beban masyarakat dengan diberikan paket sembako berupa beras, gula, minyak goreng dan sarden.

3.2. Respon Masyarakat Terdampak Terhadap Program CSR Angkasa Pura

Angkasa Pura sebagai korporasi pengelola BIL memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat terdampak pembangunan BIL. Tanggung jawab sosial yang tertuang dalam Program *Corporate Social Responsibility* secara formal merupakan amanat Undang-Undang. Namun secara sosiologis, tanggung jawab sosial Angkasa Pura dipandang oleh masyarakat secara historis sebagai kompensasi berlanjut yang didapat dari kerelaan memberikan tanah untuk pembangunan BIL. Logika berfikir tersebut pada tataran praksis menemui berbagai mis komunikasi. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial CSR Angkasa Pura hanya stimulan bagi perkembangan pembangunan di desa terdampak BIL, namun di sisi masyarakat dipahami sebagai kompensasi yang sifatnya kontiniu, seperti memberikan bantuan, membuka akses “khusus” untuk pekerjaan, dan lain sebagainya. Perbedaan pemahaman tersebut terjadi karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai program CSR Angkasa Pura, dan sebaliknya usaha

pemberian sosialisasi menyikapi minimnya pemahaman masyarakat tersebut juga belum memadai. Hal tersebut sebagaimana ungkapan R (43 tahun) yang merupakan pedagang warga masyarakat Penunjak berikut:

“Saya termasuk warga yang memiliki tanah dan mendapatkan ganti rugi, dahulu dikatakan keluarga saya dapat bekerja di BIL, namun faktanya saya dan anggota keluarga tidak dapat bekerja bahkan hanya sekedar menjadi OB. Awalnya saya berjualan di dalam BIL, tapi sering diusir (ditertibkan Angkasa Pura). Sampai akhirnya sekarang saya memutuskan berjualan di luar BIL saja, karena saya usaha modal sendiri jadi tidak nyaman kalau diusir-usir (Wawancara Tanggal 23 September 2015)”

Pernyataan Informan tersebut telah menunjukkan bentuk pemahaman masyarakat terhadap keberadaan BIL. Berbagai pengaturan yang diatur oleh korporasi seringkali dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen BIL terhadap warga masyarakat sekitar. Sama halnya dengan pelaksanaan Program CSR BIL, tidak semua masyarakat paham dan mengetahui program tersebut. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pola penyaluran CSR yang komunikasinya terbatas pada pihak desa secara sporadis saja, selain itu pemahaman masyarakat terhadap Program CSR sebagai santunan dianggap

tidak memadai. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh S (48 tahun) berikut ini, :

“Kita biasanya kalau ada program CSR kita dikabari oleh Angkasa Pura, kita dikasi tau bentuk dan jumlahnya, serta mekanisme pemberiannya. Yang terkadang susah itu setiap program itu disesuaikan dengan pertimbangan Angkasa Pura, bukan kebutuhan masyarakat, misalnya pada saat ramadhan aka nada pembagian sembako untuk warga miskin, kadang kita setiap desa hanya mendapatkan 10-20 paket sembako, sedangkan warga yang memutuhkan jumlahnya lebih dari itu, jadi malah membuat masyarakat kita berfikiran buruk terhadap kita dan dipandang pilih kasih” (Wawancara tanggal 23 September 2015).

Hal serupa juga diungkapkan oleh DZ (55 tahun) berikut ini, :

“Yang disebut komunikasi dan sosialisasi itu adalah ketika ada program kita dikabari dan diminta membagikan kepada masyarakat kita, jadi kita tidak, kadang kita yang bingung membagikan kepada masyarakat kita, karena jumlahnya tidak memadai. Sedangkan bantuan yang turun jumlahnya ditentukan dari atas (Wawancara tanggal 23 September 2015).

Ungkapan informan tersebut menggambarkan pola-pola penyaluran CSR yang telah dilakukan oleh Angkasa Pura. Menurut

ungkapan para informan segala bentuk bantuan tidak mengacu pada kebutuhan atau kondisi masyarakat kita, karena telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis penyaluran CSR Angkasa Pura. Untuk itu yang harus diperbaiki adalah bentuk pola penyaluran dan pendekatan pengembangan komunitas yang lebih bersifat *Empowering By People* daripada *Empowering for People*.

Belum optimalnya pendekatan yang dilakukan BIL dalam penyaluran program CSR berdampak pada persepsi masyarakat tentang program CSR yang cenderung setengah hati karena tidak mengacu pada permasalahan yang diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, berbagai program pengembangan komunitas yang dilakukan seperti pelatihan dan pembimbingan dilakukan tanpa dukungan modal usaha langsung yang memungkinkan bagi masyarakat yang dilatih dan dibina dapat menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Kendati demikian, bukan berarti berbagai program yang dilaksanakan Angkasa Pura dalam kegiatan CSR tidak membawa manfaat. Akan tetapi, paling tidak dalam perspektif masyarakat perlu adanya pola pendekatan baru yang lebih humanis dan benar-benar berlandaskan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selain itu, berbagai program CSR Angkasa Pura yang masuk melalui lembaga-lembaga seperti aparatur atau

kelembagaan seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana ibadah dan ditambah pola pensosialisasi dari lembaga tersebut kepada masyarakat yang tidak optimal berdampak pada pemahaman masyarakat tentang program CSR yang dilaksanakan.

Program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah berupa kegiatan bina lingkungan. Pembangunan kebutuhan dasar yang bersangkutan langsung dengan aktivitas keseharian masyarakat seperti pembangunan jalan dusun, sarana MCK, dan lain sebagainya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena terdapat bukti fisik dan dirasakan manfaatnya dalam aktivitas keseharian. Akan tetapi, secara ekonomi dan sosial, belum ada dampak yang massif terhadap perkembangan perekonomian, hal ini disebabkan program pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan belum terakses oleh masyarakat secara umum.

Harapan masyarakat, ke depannya terdapat forum rutin yang memungkinkan untuk rembuk antara warga desa di tiga desa terdampak, dengan pihak angkasa pura. Yang mana forum tersebut merupakan wahana bagi parapihak untuk dapat mensosialisasikan program bagi Angkasa Pura, sekaligus sarana bagi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang mereka perlukan. Selain itu, masih banyak masya-

rakat yang tidak terakomodir dalam serapan tenaga kerja baik dalam sektor integratif angkasa pura (sebagai karyawan) maupun sektor *embedded* seperti pengembangan UMKM, Perdagangan dan wirausaha, serta sektor jasa yang relevan diharapkan dapat dikembangkan agar dapat menjadi opsi pekerjaan baru yang lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Program CSR oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Lombok meliputi program kemitraan, program bina lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan, dan bantuan bidang kesehatan, serta kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan lainnya.
2. Respon masyarakat terdampak terhadap program CSR PT Angkasa Pura BIL, menggambarkan bahwa PT Angkasa Pura telah memberikan kontribusi bagi masyarakat terdampak melalui program (CSR). Akan tetapi, secara ekonomi dan sosial, belum ada dampak yang massif terhadap perkembangan perekonomian, hal ini disebabkan program pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan belum terakses oleh masyarakat secara

umum. Pola penyaluran bantuan CSR yang diberikan bantuan masih berorientasi pada *carity* dan pemberian santunan.

4.2 Saran

1. Potensi-potensi sosial budaya perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pemberdayaan desa terdampak. Hal ini dikarenakan desa terdampak berada di jalur wisata sehingga potensial untuk menarik wisatawan. Terutama dalam bidang pertanian dan industri

rumah tangga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* diperlukan inventarisir dan identifikasi kelompok berdasarkan orientasi kebutuhan komunitas yang dikomunikasikan dalam wahana kelembagaan yang memungkinkan pertukaran ide, aspirasi, dan kebutuhan baik bagi masyarakat, pemerintah atau aparatur terkait, serta pihak swasta. Dengan tujuan untuk mensinkronkan upaya untuk program pemberdayaan yang lebih komprehensif dan partisipatif menuju keswadayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell.
- Lynda, Judson Hanifan. 1916. "The Rural School Community Center". *Annual of the American Academy of Political and Social Science*. Hlm : 130-138.
- Narwoko, Dwi dan Bagong, Suyanto, (peny). 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Keempat, Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasikun. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Cetakan Ketigapuluh satu, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*, Edisi Kedua, Jakarta: FE-UI.